



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD DIY

Jalan Malioboro 54 Yogyakarta

Telp. : (0274) 512688; Fax : (0274) 580692

Surel : setwan@dprd-diy.go.id

Laman : www.dprd-diy.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. dan LKjIP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024

Sekretaris DPRD DIY,



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terfasilitasinya Kinerja DPRD”:
 - Diukur dengan indikator persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 95,50%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 137,09%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 143,55%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 128,44% terjadi kenaikan sebesar 8,65%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Sekretariat DPRD DIY”:
 - Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran Tahun 2023 Sekretariat DPRD DIY telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti perubahan tersebut;

2. Lokasi kantor DPRD yang terletak di kawasan Malioboro dijadikan kawasan pedestrian menjadikan akses menuju kantor terhambat bahkan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali dan disisi lain kebutuhan ruang rapat untuk DPRD saat ini tidak mencukupi sehingga DPRD DIY membutuhkan gedung baru untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
3. Adanya pemilu tahun 2024 dan terjadinya perubahan anggota DPRD DIY berdasarkan hasil pemilu untuk periode 2024-2029 sehingga meningkatkan tuntutan pelayanan terhadap kinerja DPRD DIY.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
BAB I Pendahuluan.....	8
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	8
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	10
1.3 Isu-Isu Strategis	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	13
1.5 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022	16
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26
BAB III Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	28
3.2 Capaian Kinerja Lainnya.....	44
3.3 Efisiensi Anggaran	46
3.4 Inovasi.....	47
3.5 Lintas Sektor	48
BAB IV Penutup	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja	53
LAMPIRAN	54

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan

Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana.....	14
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023.....	15
Tabel I.4 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	16
Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD DIY, 2023-2026	18
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	19
Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023	20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY Tahun 2023	24
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2023.....	25
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	28
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran 1.....	29
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023	30
Tabel III.5 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1	31
Tabel III.6 Hasil Penilaian Kinerja Setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 1	34
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan terhadap sasaran 2	36
Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023	37
Tabel III.9 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	37
Tabel III.10 Hasil Penilaian Kinerja Setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2	41
Tabel III.11 Kontribusi Sasaran Biro Organisasi Setda DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	44
Tabel III.12 Kontribusi Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	45
Tabel III.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	46
Tabel III.14 Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY	48

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Struktur Sekretariat DPRD	9
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat DPRD Setda DIY.....	10
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	26
Gambar II.2. Website JDIH DPRD DIY	26
Gambar II.3. Aplikasi E-Pokir DPRD DIY	27
Gambar III.1. Rapat Paripurna Peresmian dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD DIY Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan tahun 2019-2024 tanggal 8 November 2024.....	35
Gambar III.2. Rapat Kerja Komisi dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun 2024	36
Gambar III.3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat DPRD DIY	43

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

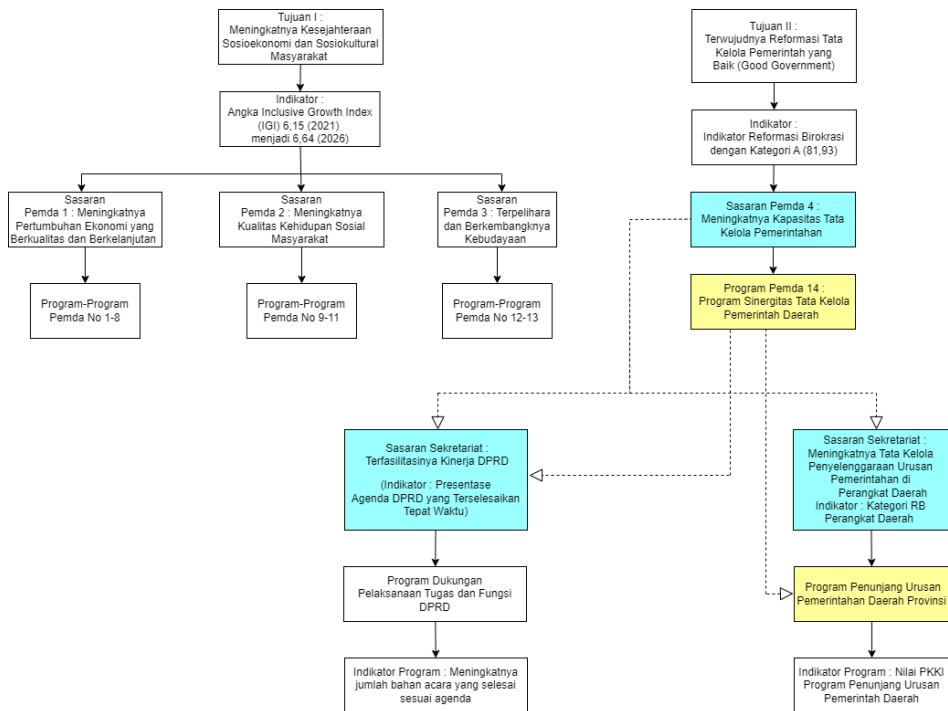
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

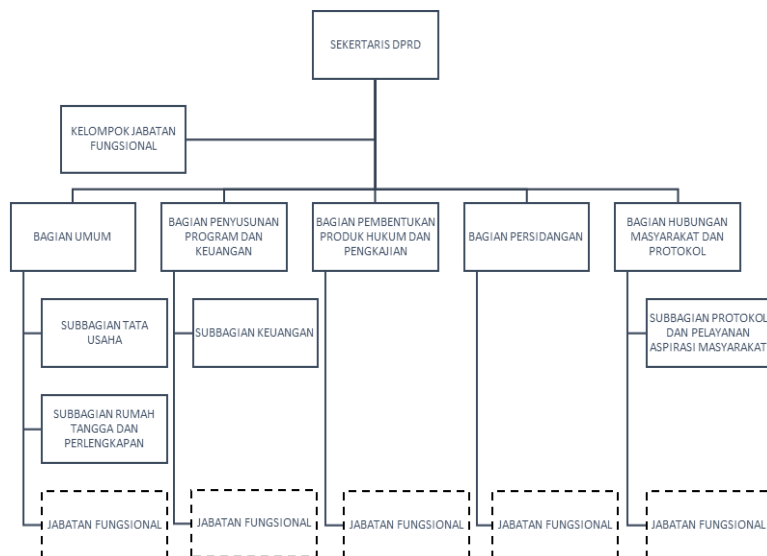
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



Sumber:RPD DIY 2023-2026

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2022

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023-2026, Sekretariat DPRD DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat DPRD DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY disebutkan bahwa: “Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggungjawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Adapun fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
7. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
8. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
9. Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar waktu Anggota DPRD;
10. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
11. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Sekretariat DPRD;
14. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD;
15. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/ Fungsional	Jabatan Pelaksana
1) Sekretaris DPRD; 2) Bagian , Subbagian terdiri dari: a. Bagian Umum, terdiri dari 2 Subbagian yaitu : i. Subbagian Tata Usaha ii. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan b. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan terdiri dari 1 Subbagian yaitu: i. Subbagian Keuangan c. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian; d. Bagian Persidangan; e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 1 Subbagian yaitu: i. Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat 3) Kelompok Jabatan Fungsional a. Analis SDM Aparatur. b. Perencana c. Perisalah Legislasi d. Pranata Komputer e. Pranata Kehumasan	1. Dibawah Kabag Umum a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2. Dibawah Kasubbag Tata Usaha a) Pranata Kearsipan b) Pengadministrasi Persuratan c) Ananlis Pelayanan 3. Dibawah Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan a) Tehnisi Sarana dan Prasarana b) Pranata jamuan c) Kustodian Barang Milik Negara d) Pranata Kendaraan e) Pengemudi 4. Dibawah Kabag Penyusunan Program dan Keuangan a) Pengadministrasi Umum b) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan c) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5. Dibawah Kasubbag Keuangan a) Bendahara b) Pengadministrasi Keuangan c) Pengelola Gaji d) Pengelola Akuntansi e) Verifikator Data dan Laporan Keuangan 6. Dibawah Kabag Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian a) Pengadministrasi Umum b) Analis Legislasi c) Penelaah Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum d) Analis Produk Hukum 7. Dibawah kabag Persidangan a) Pengadministrasi Umum b) Notulis Rapat c) Penyusun Bahan Anggota Dewan d) Penyusun Risalah 8. Dibawah Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol a) Pengadministrasi Umum b) Analis Sistem Informasi c) Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi d) Pengelola Dokumentasi 9. Dibawah Kasubbag Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat a) Analis Protokol

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan *"Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD dalam mendukung peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik"*, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD DIY melalui peningkatan pelayanan kepada DPRD DIY agar dapat menjangkau aspirasi positif sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama di pedesaan.
- b. Adanya penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat DPRD DIY untuk tetap konsisten dan maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada DPRD DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menyebabkan SDM di Sekretariat DPRD DIY harus mampu beradaptasi dan menambah wawasan terkait kemajuan teknologi dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD DIY.
- d. Keterbatasan kawasan perkantoran DPRD Jl. Malioboro Nomor 54 Yogyakarta dimana gedung DPRD DIY merupakan heritage dan rencana penerapan Pedestrian Malioboro menyebabkan terbatasnya akses dan mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga kinerja menjadi kurang optimal sehingga membutuhkan Gedung baru di lokasi yang baru yang lebih representatif.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1	-	-	-			1
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	5	5				4	4						3
	2. Pengawas	3		3			2	1	1					1
	3. Pelaksana	82		16	12	54	32	2	12	6	9	2	1	19
C.	Jabatan Fungsional	33		33			7	5	2					2
	Jumlah	124	6	52	12	54	46	13	15	6	9	2	1	26

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 15 orang (32,61%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 orang (28,26%), SMA sebanyak 9 orang (19,57%), D3 sebanyak 6 orang (13,04%), SMP sebanyak 2 orang (4,35%) dan SD 1 orang (2,17%).

Berdasarkan data tersebut diatas terdapat kekurangan pegawai di Sekretariat DPRD DIY sebanyak 56 orang, yang seharusnya jumlah ASN sebanyak 104 orang hanya terdapat 46 ASN. Untuk jabatan Analis Monitoring dan Evaluasi kosong. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Monitoring dan Evaluasi. Sekretariat DPRD DIY juga terdapat PPPK DIY sebanyak 17 orang dan beberapa tenaga outsourcing antara lain Pramuladi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Operator e-library, Staf Fraksi, Operator Penyusun Berita, dan Ajudan Pimpinan DPRD.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

Kode	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
01.03	Aset Tetap		
01.03.02	Peralatan dan Mesin	2962	26.995.180.901,09
01.03.03	Gedung dan Bangunan	7	575.781.319.533,00
01.03.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	7	522.131.759,00
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	1581	841.043.552,01
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	1.832.360.250,00
01.05	Aset Lainnya		
01.05.03	Aset Tidak Berwujud	17	1.120.433.245,00
01.05.04	Aset Lain-Lain	3	77.425.000,00
JUMLAH		4578	607.169.894.240

Sumber data: Buku Inventaris Sekretariat DPRD DIY TA 2023

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari 5 (lima) unit kendaraan dinas jabatan meliputi 1 (satu) unit kendaraan untuk operasional Ketua DPRD DIY, 3 (tiga) unit kendaraan untuk operasional Wakil Ketua DPRD DIY, dan 1 (satu) unit kendaraan untuk operasional Sekretaris DPRD DIY. Kemudian, ada 16 (enam belas) unit kendaraan dinas operasional roda empat yang diantaranya ada 4 (empat) jenis kendaraan Micro Bus berupa Hiace yang digunakan untuk operasional masing-masing komisi serta ada 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua.

Ruangan kantor umumnya mencakup ruang rapat paripurna, ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan (Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan), ruang pimpinan dewan, ruang komisi-komisi, ruang fraksi, ruang bagian-bagian yang meliputi ruang bagian perencanaan dan pengelola keuangan, ruang bagian umum, ruang bagian protokol dan hubungan masyarakat, ruang bagian persidangan, dan ruang bagian pembentukan produk hukum, ruang arsip, ruang mushola, ruang perpustakaan, serta ruang laktasi. Namun, saat ini, ruang komisi masih belum memadai karena ketersediaan ruang yang ada belum cukup untuk menampung seluruh mitra kerja komisi dalam rapat, sehingga perlu mencari ruangan lain yang lebih besar. Selain itu, anggota DPRD juga belum memiliki ruang kerja masing-masing, sehingga mereka menggunakan ruang fraksi atau komisi di kantor. Adapun perlengkapan kantor, seperti meja, kursi, mesin ketik, mesin

hitung, mesin fotocopy, brankas, whiteboard, lemari es, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain, sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio peralatan komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1, menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai..

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		Bertambah/ berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
	Jumlah Pendapatan	-	-	-
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	129.848.408.216	130.105.325.098	256.916.882
5 1 01	Belanja Pegawai	55.810.413.744	51.066.840.214	(4.743.573.530)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.037.994.472	79.038.484.884	5.000.490.412
5 2	BELANJA MODAL	1.811.678.000	1.941.030.200	129.352.200
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.789.669.800	1.919.022.000	129.352.200
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.008.200	22.008.200	-
	Jumlah Belanja	131.660.086.216	132.046.355.298	386.269.082
	Total Surplus/(Defisit)	(131.660.086.216)	(132.046.355.298)	386.269.082
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	-	-	-

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Sekretariat DPRD DIY semula Rp 131.660.086.216,- dan mengalami perubahan menjadi Rp132.046.355.298,- atau bertambah Rp386.269.082,-.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2022

Tabel I.4 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.	Bersedia meningkatkan penerapan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan
2.	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Sekretariat DPRD DIY	Bersedia Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Sekretariat DPRD DIY
3	Menggali informasi, gagasan dan ide kreatif dalam rangka pencapaian kinerja di tahun yang akan datang	Bersedia Menggali informasi, gagasan dan ide kreatif dalam rangka pencapaian kinerja di tahun yang akan datang

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan melalui mekanisme perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY selama empat tahun adalah:

“Tercapainya Kualitas Layanan Kinerja dan Aktivitas DPRD dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Adapun sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam waktu empat tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,5	95,5	96	96	96,5	96,5
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	A	A	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran melalui badan anggaran DPRD 3. Mengoptimalkan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui komisi-komisi 4. Mengoptimalkan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD 5. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 6. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD 7. Mengoptimalkan fasilitasi tugas-tugas DPRD seperti kunjungan kerja dan keprotokolan
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD DIY 2. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Keuangan Sekretariat DPRD DIY 3. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD DIY 4. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Kepegawaian di Sekretariat DPRD DIY 5. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Umum Sekretariat DPRD DIY 6. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY 7. Meningkatkan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD DIY 8. Meningkatkan fasilitasi terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY 9. Meningkatkan fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 10. Meningkatkan fasilitasi layanan administrasi DPRD

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Terfasilitasi sinya kinerja DPRD	1.1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	60.758.583.900	66.680.061.900	5.921.478.000
	1.1.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	14.120.123.900	14.978.237.400	858.113.500
	1.1.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.723.095.800	2.303.033.800	(420.062.000)
	1.1.1.2. Pembahasan Rancangan Perda	6.883.380.300	8.649.408.300	1.766.028.000
	1.1.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.294.723.100	1.361.170.100	66.447.000
	1.1.1.4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	3.218.924.700	2.664.625.200	(554.299.500)
	1.1.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.030.489.900	1.754.112.900	(276.377.000)
	1.1.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS	447.739.100	412.705.100	(35.034.000)
	1.1.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	105.397.400	105.397.400	-
	1.1.2.3. Pembahasan APBD	480.194.200	446.942.200	(33.252.000)
	1.1.2.4. Pembahasan Perubahan APBD	421.359.200	340.139.200	(81.220.000)
	1.1.2.5. Pembahasan Laporan Semester	43.171.400	33.811.400	(9.360.000)
	1.1.2.6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	532.628.600	415.117.600	(117.511.000)
	1.1.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	747.573.600	909.133.600	161.560.000
	1.1.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	382.010.400	428.130.400	46.120.000
	1.1.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	121.854.400	160.334.400	38.480.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	121.854.400	160.334.400	38.480.000
	1.1.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	121.854.400	160.334.400	38.480.000
	1.1.4. Peningkatan Kapasitas DPRD	20.202.260.800	25.578.251.800	5.375.991.000
	1.1.4.1. Pendalaman Tugas DPRD	2.334.734.800	3.084.260.300	749.525.500
	1.1.4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	11.077.690.800	15.740.019.900	4.662.329.100
	1.1.4.3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.598.326.300	1.382.326.300	(216.000.000)
	1.1.4.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	813.262.600	809.137.600	(4.125.000)
	1.1.4.5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.378.246.300	4.562.507.700	184.261.400
	1.1.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.083.196.500	7.320.796.000	2.237.599.500
	1.1.5.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	405.403.300	349.809.300	(55.594.000)
	1.1.5.2. Pelaksanaan Reses	4.677.793.200	6.970.986.700	2.293.193.500
	1.1.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	359.657.900	239.107.900	(120.550.000)
	1.1.6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD	359.657.900	239.107.900	(120.550.000)
	1.1.7. Fasilitas Tugas DPRD	18.215.281.300	15.900.422.300	(2.314.859.000)
	1.1.7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.877.645.500	5.654.633.500	(3.223.012.000)
	1.1.7.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	30.207.000	30.207.000	-
	1.1.7.3. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.344.419.200	989.501.200	(354.918.000)
	1.1.7.4. Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	7.963.009.600	9.226.080.600	1.263.071.000
2. Meningkatkan tata kelola	2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.901.502.316	65.366.293.398	(5.535.208.918)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.747.800	91.597.800	(11.150.000)
	2.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.726.900	25.926.900	(9.800.000)
	2.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.438.600	32.438.600	
	2.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.582.300	33.232.300	(1.350.000)
	2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.876.109.335	8.907.129.005	(968.980.330)
	2.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.744.480.235	8.775.499.905	(968.980.330)
	2.1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.920.000	58.920.000	-
	2.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.900.000	12.900.000	-
	2.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59.809.100	59.809.100	-
	2.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.403.000	21.403.000	-
	2.1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.403.000	21.403.000	-
	2.1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	355.907.600	313.159.600	(42.748.000)
	2.1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.412.600	4.412.600	-
	2.1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	351.495.000	308.747.000	(42.748.000)
	2.1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.291.463.100	1.256.860.100	(34.603.000)
	2.1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.577.300	34.822.300	1.245.000
	2.1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.290.100	161.354.100	(936.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.146.700	23.146.700	-
	2.1.5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	146.699.000	135.334.000	(11.365.000)
	2.1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	925.750.000	902.203.000	(23.547.000)
	2.1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.644.452.600	2.733.648.050	89.195.450
	2.1.6.2. Pengadaan Mebel	79.913.900	79.913.900	-
	2.1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.707.360.700	1.838.877.900	131.517.200
	2.1.6.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	857.178.000	814.856.250	(42.321.750)
	2.1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.289.139.500	3.156.479.500	(132.660.000)
	2.1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.168.163.500	1.038.203.500	(129.960.000)
	2.1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.120.976.000	2.118.276.000	(2.700.000)
	2.1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.176.585.672	2.055.814.734	(120.770.938)
	2.1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	434.187.500	455.674.500	21.487.000
	2.1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	738.031.300	752.201.600	14.170.300
	2.1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.710.600	281.551.728	30.841.128
	2.1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	753.656.272	566.386.906	(187.269.366)
	2.1.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	46.350.306.509	42.559.169.709	(3.791.136.800)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.990.213.509	42.215.620.309	(3.774.593.200)
	2.1.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	84.651.100	83.751.100	(900.000)
	2.1.9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	275.441.900	259.798.300	(15.643.600)
	2.1.10. Layanan Administrasi DPRD	4.793.387.200	4.271.031.900	(522.355.300)
	2.1.10.1. Fasilitas Fraksi DPRD	2.945.549.900	2.733.390.900	(212.159.000)
	2.1.10.2. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.847.837.300	1.537.641.000	(310.196.300)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		131.660.086.216	132.046.355.298	386.269.082

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretaris DPRD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	Triwulan I	31,20
					Triwulan II	58,04
					Triwulan III	81,70
					Triwulan IV	95,50
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp70.901.502.316,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp60.758.583.900,00
Jumlah Anggaran		Rp131.660.086.216,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*
Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD DIY melaksanakan revaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Revaluasi dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Revaluasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	Triwulan I	31,20
					Triwulan II	58,04
					Triwulan III	81,70
					Triwulan IV	95,50
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

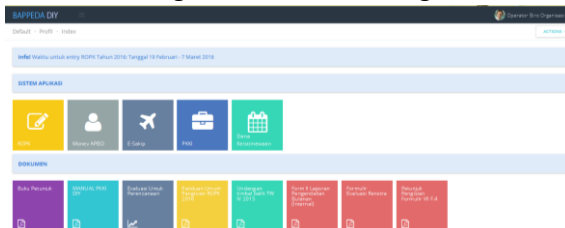
No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp66.680.061.900,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp65.366.293.398,00
Jumlah Anggaran		Rp132.046.355.298,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Instrumen yang digunakan sebagai wadah pemberdayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat adalah website JDIH DPRD DIY Melalui JDIH DPRD DIY ini publik dapat melihat dinamika perkembangan Perda/ Perdaes, Peraturan DPRD Keputusan DPRD, kajian pengawasan dan artikel hukum lain.

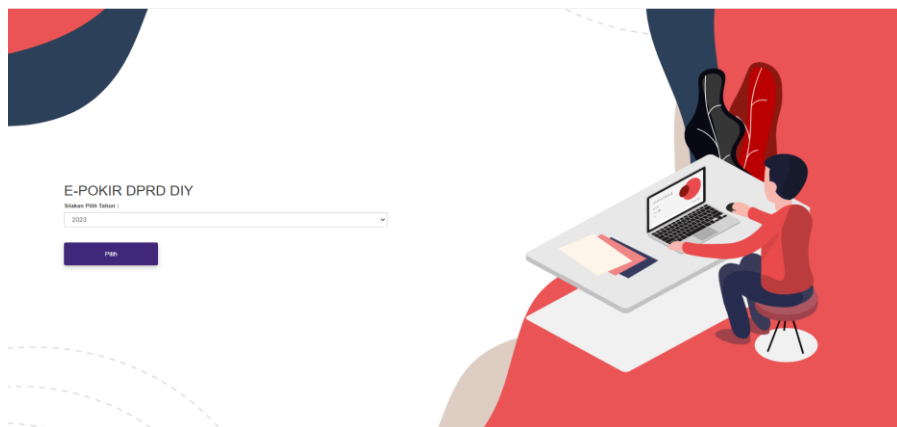
Gambar II.2. JDIH DPRD DIY



Sumber: <https://jdi.h.dprd-diy.go.id/>

3. Instrumen yang digunakan oleh Sekretariat DPRD DIY untuk memfasilitasi anggota DPRD DIY dalam mengusulkan kegiatan sebagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah Aplikasi E-Pokir DPRD DIY. Di dalam aplikasi ini terdapat menu pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Setelah di input dalam aplikasi oleh Anggota DPRD DIY kemudian diverifikasi oleh Sekretariat DPRD DIY, dilanjutkan verifikasi oleh OPD terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kegiatan tersebut dan terakhir diverifikasi oleh TAPD (Bappeda dan BPKA).

Gambar II.3 Aplikasi E-Pokir DPRD DIY



<https://pokir.jogjaprov.go.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Sa tu an	Baseli ne 2021	Reali sasi 2022	Tahun 2023				Target Akhir RPD
						Target	Realisasi	Persen tase	Kriteria /Kode	
1	Terfasilitas inya kinerja DPRD	<u>Indikator:</u> Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu <u>Meta</u> <u>Indikator:</u> Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%	%	96,50	128, 44	95,50	137,09	143,55	Sangat Baik	96,50

No	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Sa tu an	Baseli ne 2021	Reali sasi 2022	Tahun 2023				Target Akhir RPD
						Target	Realisasi	Persen tase	Kriteria /Kode	
2	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY <u>Meta Indikator:</u> Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	Sangat Baik	A

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id>

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD

Kinerja sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD diukur dengan indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100

Sumber data diolah dari jumlah agenda DPRD yang selesai (terdiri dari jumlah bahan acara sebanyak 53 bahan acara ditambah jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi sebanyak 32 laporan), sehingga jumlah total agenda DPRD yang selesai sebanyak 85 kemudian dibagi dengan jumlah agenda yang direncanakan (terdiri dari 30 bahan acara dan 32 laporan) sehingga jumlah total 62 dikali 100% atau dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

(Bahan acara + jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi) / jumlah agenda yang direncanakan (bahan acara+laporan) x 100%

$$\frac{(53 + 32)}{(30 + 32)} \times 100\% = 137,09\%$$

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Indikator:</u> Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu <u>Meta Indikator:</u> Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%	128,44%	95,50%	137,09% (85 agenda yang selesai / 62 agenda yang direncanakan x 100)	143,55 (137,09 / 95,50 x 100)	96,50%	148,70

Sumber: <http://sengguh.jogjaprovo.go.id>

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD adalah sebagai berikut:

- Tercapai 137,09%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 143,55% (terlampau).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 128,44%, terdapat kenaikan sebesar 8,65%.
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 148,70%

Keberhasilan capaian sasaran 1, dengan Indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,50%	137,09%	148,70
	1.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				
	1.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%
	1.1.2. Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	16 dokumen	16 dokumen	100%
	1.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 dokumen	8 dokumen	100%
	1.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	158 dokumen	195 dokumen	123%
	1.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran				
	1.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.2.3. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.2.4. Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.2.5. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.2.6. Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
	1.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6 laporan	6 laporan	100%
	1.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 laporan	4 laporan	100%
	1.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	4 laporan	100%
	1.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 laporan	4 laporan	100%
	1.4. Peningkatan Kapasitas DPRD				
	1.4.1. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 dokumen	5 dokumen	100%
	1.4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	18 dokumen	18 dokumen	100%
	1.4.3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 orang	18 orang	100%
	1.4.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	7 orang	100%
	1.4.5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	33 dokumen	43 dokumen	130%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
	1.5.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.5.2. Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen	100%
	1.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
	1.6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	3 laporan	100%
	1.7. Fasilitasi Tugas DPRD				
	1.7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	20 dokumen	100%
	1.7.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	1 laporan	100%
	1.7.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 dokumen	14 dokumen	100%
	1.7.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	13 dokumen	13 dokumen	100%

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id>

Capaian sasaran 1 Terfasilitasinya kinerja DPRD didukung dari capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yaitu:

-Indikator Program: Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu

-Ditargetkan 95,50% terealisasi 137,09% diperoleh dari jumlah agenda DPRD yang selesai (terdiri dari jumlah bahan acara sebanyak 53 bahan acara ditambah jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi sebanyak 32 laporan), sehingga jumlah total agenda DPRD yang selesai sebanyak 85 kemudian dibagi dengan jumlah agenda yang direncanakan (terdiri dari 30 bahan

acara dan 32 laporan) sehingga jumlah total 62 dikali 100% atau dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

(Bahan acara + jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi) / jumlah agenda yang direncanakan (bahan acara+laporan) x 100%

$$\frac{(53 + 32)}{(30 + 32)} \times 100\% = 137,09\%$$

-Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan 7 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

- Hasil Penilaian kinerja setiap Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.6 Hasil Penilaian Kinerja Setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 1

2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Score
2.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	96,1
2.2	Pembahasan Rancangan Perda	96,1
2.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	98,6
2.4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	96,1
2.5	Pembahasan KUA dan PPAS	96,1
2.6	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	96,1
2.7	Pembahasan APBD	96,1
2.8	Pembahasan Perubahan APBD	96,1
2.9	Pembahasan Laporan Semester	93,67
2.1	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	96,1
2.11	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	96,1
2.12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	96,1
2.13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	96,1
2.14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	96,1
2.15	Pendalaman Tugas DPRD	96,1
2.16	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	98,6
2.17	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	98,6
2.18	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	96,1
2.19	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100

2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Score
2.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	96,1
2.21	Pelaksanaan Reses	98,6
2.22	Pengawasan Kode Etik DPRD	96,1
2.23	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	96,1
2.24	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	98,6
2.25	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	98,6
2.26	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96,1

Faktor Pendukung keberhasilan:

- Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas pokok fungsi DPRD DIY;
- Kepatuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam berpedoman terhadap Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya;
- Adanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD DIY dan tambahan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY di triwulan IV, sehingga menambah jumlah bahan acara yang terselesaikan.

Gambar III.1.1 : Rapat Paripurna Peresmian dan Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD DIY Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan tahun 2019-2024 tanggal 8 November 2024



Gambar III.1.2 : Rapat Kerja Komisi dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun 2024



3.1.2. Sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Nilai Kategori Reformasi Birokrasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	A	A	A	100%	100%	100%

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kategori Reformasi Birokrasi A, dengan demikian target kategori reformasi birokrasi A (terlampaui).
- b. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 9 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI		Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	A	A	100
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100%
	1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	80 orang/bulan	100%
	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	100%
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD				
	1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	14 laporan	14 laporan	100%
	1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dokumen	16 dokumen	100%
	1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 orang	21 orang	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
	1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
	1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
	1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	100%
	1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.6.1. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	108 unit	107 unit	99%
	1.6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
	1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 laporan	50 laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	60 laporan	100%
	1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	100%
	1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	29 unit	100%
	1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274 unit	274 unit	100%
	1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100%
	1.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
	1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 orang/bulan	55 orang/bulan	100%
	1.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Penyediaan pakaian dinas dan atribut sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	55 paket	55 paket	100%
	1.9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 orang	41 orang	74%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.10. Layanan Adminstrasi DPRD				
	1.10.1.Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	196 laporan	217 laporan	110%
	1.10.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14 laporan	14 laporan	100%

Capaian Sasaran 2 dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung dari Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yaitu:

- Indikator program : Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- Ditargetkan nilai 88 terealisasi nilai 92,44 (105,04%).
- Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.
- Hasil Penilaian kinerja setiap Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.10 Hasil Penilaian kinerja setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2

No	Program/Sub Kegiatan	Score
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92,44
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97,6
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	97,6
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97,6
1.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,6
1.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	93,6
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88,6
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	93,6
1.8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	93,6

No	Program/Sub Kegiatan	Score
1.9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	88,6
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93,6
1.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93,6
1.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,6
1.13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93,6
1.14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93,6
1.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93,6
1.16	Pengadaan Mebel	93,6
1.17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81,1
1.18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93,6
1.19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93,6
1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93,6
1.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,6
1.22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93,6
1.23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93,6
1.24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93,6
1.25	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	89,4
1.26	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	94,27
1.27	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	69,44
1.28	Fasilitasi Fraksi DPRD	97,6
1.29	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	93,6

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id>, Dokumen PKKI Triwulan IV Tahun 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Komitmen Pejabat Struktural, Fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai arahan pemda;
- b. Komitmen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK);

Faktor Penghambat Keberhasilan

- a. Pengadaan tas lensa sebanyak 1 buah tidak terlaksana karena metode pelaksanaan pengadaan dengan *e-cataloge* dan produk tersebut tidak tersedia dalam *e-cataloge*
- b. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tidak tercapai sesuai target yaitu sebesar 51 orang karena sebanyak 10 orang tidak melaksanakan Medical Check up sesuai dengan hak nya, sehingga hanya tercapai 41 orang.

Gambar III.1.3: Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat DPRD DIY Guna Menunjang Kinerja DPRD DIY



3.2. Capaian Kinerja Lainnya

- a. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda sebagaimana amanat cascading Kinerja Sekretariat DPRD DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.11 Kontribusi Sasaran Sekretariat DPRD DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP	WTP AA	*) WTP AA	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY)	95,50%	137,09%
					Meningkatnya Tatakelola Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	A	A

Penjelasan:

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki ketugasan membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam mendukung tata kelola pemerintah daerah dengan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD serta tetap memperhatikan peraturan dan arahan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor 90 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tabel III.12 Kontribusi Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tinggi 86,07	Tinggi 86,67	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	95,50%	137,09%	143,55
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88	92,44	105,04

Sumber : Ekspose Pengendalian Kinerja s.d. Triwulan IV 2023 pada tanggal 25 Januari 2023

Penjelasan

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah DIY merupakan akumulasi dari SKM seluruh OPD termasuk Sekretariat DPRD DIY.
2. Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD DIY, menjadi metode penyajian data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat DPRD DIY. Survei ini, dijadikan tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan sekaligus *feedback* perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat, selain itu merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelayanan publik.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,50	137,09	143,55	66.680.061.900	59.387.176.335	89,06	7.292.885.565
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	A	A	100	65.366.293.398	64.021.823.087	97,94	1.344.470.311
Jumlah						132.046.355.298	123.408.999.422	93,46	8.637.355.876
Total Belanja Operasional						132.046.355.298	123.408.999.422	93,46	8.637.355.876

Sumber: <http://sengguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Th 2023, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD DIY Th 2023

Berdasarkan tabel III.13 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD DIY melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp132.046.355.298,00 dan terealisasi Rp123.408.999.422,00 atau 93.46%, sehingga dapat dikatakan efisien.

Terdapat efisiensi Rp8.637.355.876,00 atau 6,54% yang bersumber dari:

- Efisiensi pada makan minum rapat yang tidak terserap karena komunikasi lebih banyak sosial media dan untuk makan minum rapat yang melibatkan anggota DPRD menyesuaikan kebutuhan.
- Efisiensi Penggandaan karena sudah banyak menggunakan sistem *paperless*
- Sisa pengadaan barang dan jasa (lelang/selisih antara nilai Kontrak dengan Pagu yang ada)
- Efisiensi anggaran gaji anggota DPRD DIY karena Beberapa Anggota DPRD DIY mengalami proses PAW (meninggal dunia dan mengundurkan diri) sehingga ada waktu jeda pembayaran gaji
- Efisiensi anggaran *Medical Check Up* (MCU) anggota DPRD karena ada beberapa anggota yang tidak melaksanakan MCU
- Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam negeri karena ada beberapa anggota dewan yang tidak mengikuti kunjungan dan sisa dari at cost tiket karena ada yang menggunakan moda kereta api dan sisa dari penginapan 30%.
- Efisiensi honor narasumber karena beberapa kegiatan ada yang tidak menggunakan narasumber dan beberapa kegiatan yang menggunakan narasumber ASN Pemda DIY sehingga tidak diberikan honor.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Sistem pengamanan berbasis elektronik setiap tamu yg masuk ke kantor DPRD harus lapor dan mengisi buku tamu dan dilakukan pengambilan gambar data

tersebut melalui hilook cctv dan di simpan dalam google drive buku tamu DPRD DIY

- b. Optimalisasi pengelolaan kearsipan ini untuk pengelolaan arsip vital, terutama arsip bahan acara di simpan ke dalam google drive untuk mempermudah jika sewaktu-waktu diperlukan
- c. Penggunaan inovasi *Pak Lalu Uber Dana* yang merupakan sebuah upaya percepatan layanan penatausahaan keuangan dengan membangun kolaborasi antara tim penatausahaan keuangan dengan PPTK dalam pemanfaatan google *spreadsheet* dan *Linktree*. Uber Dana menyediakan menu-menu percepatan layanan dalam bentuk *google spreadsheet* dan terhubung melalui *linktree* sehingga pengumpulan BKU dari PPTK menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Melalui *Google Spreadsheet* terbentuk komunikasi dua arah antara Subbagian Keuangan dengan pemangku kegiatan. *Linktree* menyediakan menu-menu yang dapat diakses oleh PPTK, antara lain template BKU, juknis dan alur SPJ, Monitoring Proses SPJ dan spreadsheet masing-masing Bagian.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Sekretariat DPRD DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan skema kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.14
Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Penyusunan Kebijakan Anggaran	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran DPRD DIY bersama TAPD, Rapat-Rapat Komisi bersama mitra kerjanya masing-masing	Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, KUPA PPASP, Raperda APBD dan Raperda APBD P, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)	OPD di Lingkungan Pemda DIY dan Masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bagi Pemda DIY: menjadi kepastian hukum pelaksanaan program dan belanja daerah 2. Kelompok sasaran Masyarakat: sebagai stimulus perekonomian di masyarakat dengan program kegiatan berupa bantuan hibah/bansos maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY.

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Perguruan Tinggi	Memberikan masukan sebagai narasumber pada kegiatan Publik Hearing dan rapat-rapat kerja di DPRD			
		Masyarakat	Memberikan masukan pada saat publik hearing penyusunan APBD			
		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan evaluasi RAPBD Murni, Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah			
2.	Pembentukan Perda dan peraturan DPRD	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi Rapat-Rapat penyusunan Naskah Akademik, Rapat-Rapat Bapemperda, Rapat pansus-Pansus	Pembentukan Perda dan peraturan DPRD	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi Rapat-Rapat penyusunan Naskah Akademik, Rapat-Rapat Bapemperda, Rapat pansus-Pansus
		Kanwil Kemenkumham	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, harmonisasi rperda inisiatif dan Narasumber pada pembahasan Raperda oleh Pansus		Kanwil Kemenkumham	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, harmonisasi rperda inisiatif dan Narasumber pada pembahasan Raperda oleh Pansus

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Perguruan tinggi	Narasumber pada tim penyusun NA Raperda Inisiatif DPRD		Perguruan tinggi	Narasumber pada tim penyusun NA Raperda Inisiatif DPRD
		OPD Teknis	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, dan menjadi mitra dalam pembahasan Bersama pansus		OPD Teknis	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, dan menjadi mitra dalam pembahasan Bersama pansus
		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan Evaluasi terhadap Raperda-raperda Anggaran, Pajak dan RT-RW. 2. Fasilitasi Raperda-Raperda di luar Anggaran Pajak, Retribusi dan RTRW		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan Evaluasi terhadap Raperda-raperda Anggaran, Pajak dan RT-RW. 2. Fasilitasi Raperda-Raperda di luar Anggaran Pajak, Retribusi dan RTRW

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD DIY memiliki 2 (dua) indikator sasaran dan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni :
 - a. Sasaran Terasilitasinya Kinerja DPRD, terealisasi 137,09% dari target 96,5% dengan prosentase realisasi sebesar 143,55%;
 - b. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY, terealisasi dengan kategori A dari target A, dengan prosentase realisasi sebesar 100%.
2. Hambatan dan permasalahan
 - a. Adanya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 September 2023 yang merupakan dasar pemberian Lumpsum bagi anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas biasa dalam negeri dan adanya perubahan beberapa harga satuan untuk tiket dan hotel bagi anggota DPRD sehingga menjadikan jumlah anggaran yang tersedia untuk perjalanan dinas anggota DPRD menjadi kurang dikarenakan pada tanggal tersebut proses APBD Perubahan Pemda DIY sudah sampai dengan tahapan menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk mencukupi hal tersebut maka harus dilakukan pergeseran anggaran dari sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak terpakai.
 - b. Proses pengadaan barang yang harus melalui aplikasi online seperti *e-cataloge* dan *m-Bizz market* sehingga untuk pilihan barang kurang variatif karena keterbatasan penyedia yang mendaftar pada aplikasi tersebut. Untuk tahun 2023 pada Sekretariat DPRD DIY terdapat 1 buah tas lensa yang tidak terlaksana dilakukan pembelian karena tidak tersedia dalam *e-cataloge*.
 - c. Kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* bagi anggota DPRD DIY ada 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD DIY tidak menggunakan fasilitasi *Medical Check Up* tanpa ada konfirmasi sejak awal.

Faktor-Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Sekretariat DPRD DIY antara lain:

- a. Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas pokok fungsi DPRD DIY ;
 - b. Kepatuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam berpedoman terhadap Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya;
 - c. Kesiapan sarana, Prasarana dan personil Sekretariat DPRD yang profesional serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan media sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - d. meningkatnya aktifitas kegiatan DPRD bertemu masyarakat baik dalam sosialisasi peraturan perundangan maupun penyerapan aspirasi masyarakat.
3. Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD lebih meningkat.
 - b. Penjadwalan/perencanaan kegiatan menyesuaikan tata kala yang diatur dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi raperda APBD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up menyesuaikan hasil pendataan/check list yang dilakukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dilakukan perubahan target kinerja dalam perubahan APBD

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Sasaran Strategis	Indikator/Met a Indikator	Satua n	Baselin e 2022	Target				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	95,50	96,00	96,00	96,50	96,50
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraa n urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indek s	A	A	A	A	A	A

တရားရုံးကြီးကလေးတရားရုံးကြီး၊ တရားရုံးကြီး၊ တရားရုံးကြီး

Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274) 512688, 512820, 560293, 565622 Faksimile
(0274) 580692 e-mail: setwan@dprd-div.do.id website: dprd-div.go.id Kode Pos: 55213

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya pergantian/mutasi pejabat dan/atau penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. IMAM PRATANADI, M.T.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAH KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs. IMAM PRATANADI, M.T.
NIP. 196710311997031001

'PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95.50	Triwulan I	31.20
					Triwulan II	58.04
					Triwulan III	81.70
					Triwulan IV	95.50
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp 66.680.061.900,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 65.366.293.398,00
	Jumlah Anggaran	Rp132.046.355.298,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


Drs. IMAM PRATANADI, M.T.
NIP.196710311997031001

R

INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.logiaprov.go.id> e-mail: inspektorat@logiaprov.go.id Kode Pos 55166

Kepada

Yth. Sekretaris DPRD DIY

di -

Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. 字

- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2021 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 052/II/INSP/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai Peraturan Gubernur DIY 132 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas "Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
- g. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
- h. Fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. Penyelenggaraan Administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
- j. Fasilitasi Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD DIY memiliki susunan struktur organisasi terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

- 3) Kelompok Substansi Kepegawaian.
- c. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Kelompok Substansi Penyusunan Program; dan
 - 3) Kelompok Substansi Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Pembentukan Produk Hukum;
 - 2) Kelompok Substansi Pengkajian dan Pengawasan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Dokumentasi Hukum.
- e. Bagian Persidangan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Komisi dan Kepanitiaan DPRD;
 - 2) Kelompok Substansi Fasilitas Persidangan; dan
 - 3) Kelompok Substansi Risalah dan Dokumen Persidangan.
- f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Substansi Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat;
 - 2) Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat; dan
 - 3) Kelompok Substansi Data dan Teknologi Informasi.
- g. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Sekretariat DPRD DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya

manusia ...

manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas fungsi adalah penggunaan aplikasi e-Pokir.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Sekretariat DPRD DIY telah menindaklanjuti dengan:

- berupaya meningkatkan kualitas penyajian data dan pelaporan kinerja dalam LKIP dengan berpedoman dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan didukung dengan data-data yang valid;
- Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target *output*, *outcome*, maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Sekretariat DPRD DIY memperoleh nilai sebesar 85,86. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,30 atau 87,68% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,39 atau 84,64% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,71 atau 84,76% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,45 atau 85,80% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Sekretaris DPRD DIY agar:

- a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
- b. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Sekretariat DPRD DIY
- c. Menggali inovasi, gagasan, dan ide kreatif dalam rangka pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

C. ...

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD DIY memperoleh nilai 85,86. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat DPRD DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Sekretariat DPRD DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP.19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274) 512820 Faksimile (0274) 580692 e-mail: setwan@dprd-diy.go.id website: dprd-diy.go.id kode Pos: 55213

Yogyakarta, 11 April 2023

Nomor : 700/ 03496
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Tanggapan atas Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) pada
Sekretariat DPRD DIY Tahun
2022

Kepada :
Yth. Inspektur DIY
di—

YOGYAKARTA,

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Inspektur DIY Nomor 700/01122 tanggal 20 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023, Sekretariat DPRD DIY bersedia melaksanakan rekomendasi, yaitu :

1. Meningkatkan penerapan manajemen kinerja berkelanjutan yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal.
2. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pencapaian indikator sasaran Sekretariat DPRD DIY.
3. Menggali inovasi, gagasan, dan ide kreatif dalam rangka pencapaian kinerja ditahun yang akan datang.

Demikian mohon dapat menjadi periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS,

HARYANTA, SH
NIP. 19631009 1993031007



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**